

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. Gambaran Umum Kabupaten Sumenep

Gambaran umum wilayah Kabupaten Sumenep meliputi kondisi geografis, administratif, kondisi fisik wilayah, demografi, keuangan dan perekonomian daerah, sosial budaya dan kelembagaan.

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Sumenep terletak pada koordinat antara 113°32'54" sampai 116°16'48" Bujur Timur dan 4°55' sampai 7°24' Lintang Selatan, memiliki 126 buah pulau besar dan kecil baik yang berpenghuni maupun belum. Batas-batas wilayah Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

- a. Bagian Utara : Laut Jawa
- b. Bagian Selatan : Selat Madura
- c. Bagian Barat : Kabupaten Pamekasan
- d. Bagian Timur : Laut Jawa dan Laut Flores

Wilayah Kabupaten Sumenep terdiri dari daratan dan kepulauan. Kabupaten Sumenep memiliki 126 pulau (sesuai dengan hasil sinkronisasi luas Kabupaten Sumenep Tahun 2002), tersebar membentuk gugusan pulau-pulau baik berpenghuni (48 pulau) maupun tidak berpenghuni (78 pulau). Pulau paling utara adalah Pulau Karamian yang terletak di Kecamatan Masalembu dengan jarak ±151 mil laut dari Pelabuhan Kalianget, dan pulau yang paling timur adalah Pulau Sakala dengan jarak ±165 mil laut dari Pelabuhan Kalianget.

2. Administratif

Luas daerah Kabupaten Sumenep adalah 1998,54 km merupakan 4,2% dari luas Propinsi Jawa Timur. Secara fisik luas Kabupaten Sumenep terbagi menjadi 2 bagian yaitu Bagian Daratan dengan luas 1.147,27 km² (57,40% dari luas wilayah, Bagian Kepulauan dengan luas 851,30 km² (42,60% dari luas wilayah. Sedangkan bagian kepulauan terdiri dari 126 buah pulau besar dan kecil.

Luas perairan laut Kabupaten Sumenep \pm 50.000 km², dengan potensi sumberdaya ikan diperkirakan sebesar 229.000 ton/tahun dan potensi lestari dihitung 60% dari jumlah potensi yang ada atau 137.400 ton/tahun. Potensi budidaya tambak seluas 1.723,41 Ha, serta terdapat pula budidaya kerang mutiara, budidaya ikan karang/kerapu, budidaya ikan air tawar serta potensi wisata bahari. Wilayah Kabupaten Sumenep merupakan salah satu penghasil benih rumput laut jenis *Eucheuma cottoni* dan *E. Spinosum*. Jumlah benih rumput laut yang dihasilkan diperkirakan rata-rata sebesar \pm 10-25% dari jumlah total produksi yang dihasilkan. Potensi areal rumput laut di Kabupaten Sumenep seluas \pm 11.500 Ha tersebar di beberapa wilayah kecamatan, antara lain Gili Genting, Bluto, Saronggi, Talango, Gapura, Dungkek, Ra'as, Sapeken, Kangayan, Arjasa, dan Masalembu. Penangkapan di perairan umum dilakukan oleh masyarakat sebagai usaha sampingan dengan menggunakan alat penangkapan berupa pancing dan jala lempar. Luas perairan umum \pm 121.12 Ha dan menghasilkan produksi sebesar 77.65 ton per tahun. Jenis ikan hasil tangkapan berupa ikan nila, tawes, lele, mujair dan belanak.

Peluang usaha dan investasi bidang perikanan di Kabupaten Sumenep dari perikanan tangkap yaitu ikan karang, ikan layang, ikan hias. Pengembangan cabang usaha budidaya laut meliputi budidaya rumput laut, mutiara, kerapu dan lobster. Komoditas unggulannya adalah ikan teri nasi dengan jumlah produksi mencapai 1.375 ton per tahun. Untuk pemasaran sendiri, kualitas ikan teri nasi kering Kabupaten Sumenep sudah mampu memenuhi permintaan pasar luar negeri (eksport).

Untuk usaha dibidang pengolahan hasil perikanan yang mempunyai peluang untuk dikembangkan adalah pengolahan rumput laut dan ikan kering. Hal ini didukung oleh banyaknya hasil tangkapan ikan layang dari daerah Pasongsongan, Batang-batang, Ambunten, Masalembu, dan Pulau Sapudi. Pada tahun 2006 juga telah diadakan pelatihan tentang cara pengolahan produk-produk olahan rumput laut kepada para kelompok pembudidaya rumput laut dan juga pemberian bantuan peralatan pengolahan rumput laut. Sehingga diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang mengolah rumput laut menjadi bahan olahan.

Pemasaran ikan di kabupaten sumenep biasanya hasil perikanan didistribusikan ke pasar-pasar di daerah sumenep itu sendiri, kemudian pemasaran antar kota di wilayah madura, dan sampai ke luar kota seperti surabaya, pasuruan dan lamongan bisa berupa ikan segar, rumput laut dan teri nasi ke eksportir.

Secara administratif Kabupaten Sumenep termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 wilayah kecamatan, 332 desa/kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 2,093.47 km². Pusat

pemerintahan kabupaten berada di Kota Sumenep tepatnya di Kecamatan Kota Sumenep

Tabel 3.1
Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Desa/ Kelurahan

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas Wilayah			
			Administrasi		Terbangun	
			Km2	% terhadap total	Km2	% terhadap total
1	Pragaan	14	57.84	2.76	9.32	0.45
2	Bluto	20	51.25	2.45	13.07	0.62
3	Saronggi	14	67.71	3.23	9.76	0.47
4	Gili Genting	8	30.32	1.45	6.65	0.32
5	Talango	8	50.27	2.40	7.81	0.37
6	Kalianget	7	30.19	1.44	3.12	0.15
7	Kota Sumenep	16	27.84	1.33	6.83	0.33
8	Batuan	7	27.10	1.29	4.09	0.20
9	Lenteng	20	71.41	3.41	4.40	0.21
10	Ganding	14	53.97	2.58	6.20	0.30
11	Guluk-Guluk	12	59.57	2.85	5.68	0.27
12	Pasongsongan	10	119.03	5.69	15.05	0.72
13	Ambunten	15	50.54	2.41	4.36	0.21
14	Rubaru	11	84.46	4.03	7.45	0.36
15	Dasuk	15	64.50	3.08	4.68	0.22
16	Manding	11	68.88	3.29	3.04	0.15
17	Batu Putih	14	112.31	5.36	10.61	0.51
18	Gapura	17	65.78	3.14	7.98	0.38
19	Batang-Batang	16	80.36	3.84	20.57	0.98
20	Dungkek	15	63.35	3.03	6.79	0.32
21	Nonggunong	8	40.08	1.91	1.46	0.07
22	Gayam	10	88.40	4.22	5.85	0.28
23	Raas	9	38.90	1.86	5.78	0.28
24	Sapeken	9	201.89	9.64	1.59	0.08
25	Arjasa	19	241.99	11.56	5.88	0.28
26	Kangayan	9	204.68	9.78	5.88	0.28
27	Masalembu	4	40.85	1.95	2.90	0.14
	Jumlah	332	2.093.47	100.00	186.80	8.92

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

3. Topografi

Kondisi Topografi di Kabupaten Sumenep dapat dilihat dari suatu kondisi objektif ketinggian dan kemiringan lahan. Kemiringan lahan ini merupakan salah

satu faktor penting yang perlu dilihat dalam aspek topografi, karena beberapa peruntukan lahan memerlukan persyaratan kemiringan lahan.

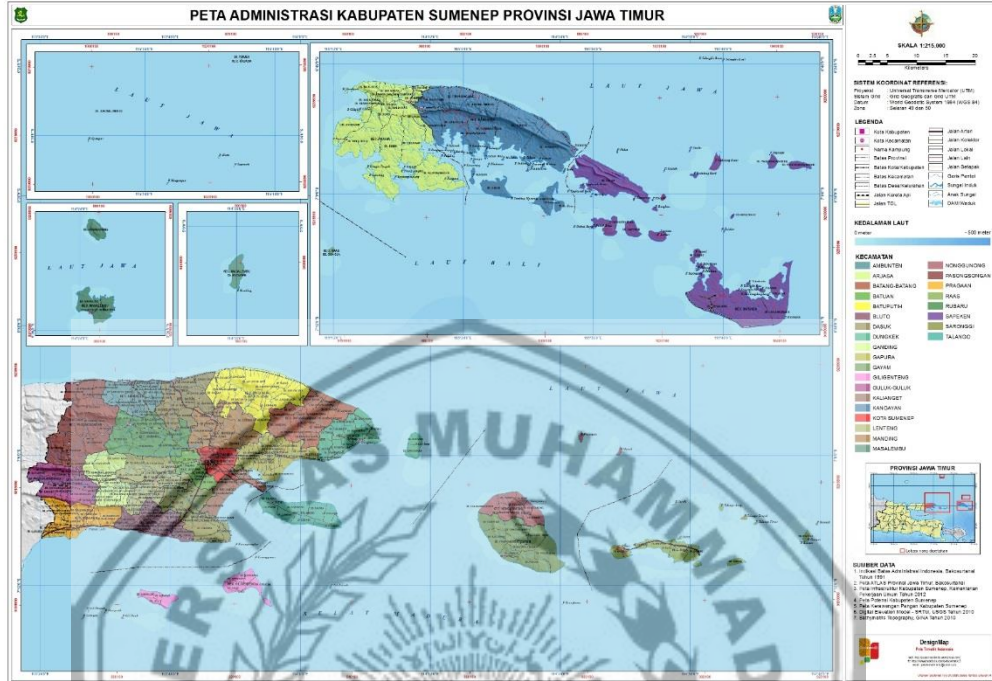
Kabupaten Sumenep secara umum berada pada ketinggian antara 0-500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan sebagian lagi berada pada ketinggian antara 500 – 1000 meter di atas permukaan laut. Kondisi ketinggian wilayah di Kabupaten Sumenep dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Wilayah dengan ketinggian 0 – 500 meter dpl seluas 208.697,40 Ha atau mencapai luasan sekitar 99,72 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Sumenep;
- b. Wilayah yang memiliki ketinggian 500-1000 meter dpl mencapai luasan 578,42 Ha atau sekitar 0,28 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Sumenep;

Selain dari ketinggian, kondisi topografi juga dapat dilihat dari kemiringan lahan. Kabupaten Sumenep dengan luas sekitar 2.093,458 Km², memiliki tingkat kemiringan lahan yang bervariasi antara 0%-30%, 30% - 60% dan di atas 60%. Wilayah yang paling luas memiliki kemiringan 0-30%, dengan capaian luasan sekitar 1.613,29 Ha atau 77,51%.

Sedangkan kemiringan terluas berikutnya berada pada level 30-60% dengan capaian luasan sekitar 437,39 Ha atau 21,02%. Kawasan ini dijumpai berupa kawasan perbukitan. Sedangkan pada ketinggian > 60 % berupa pegunungan yang hanya mencapai luasan sekitar 30,75 Ha atau 1,48

Gambar 3.1
Peta Administrasi Kabupaten Sumenep



4. Hidrologi

Secara kondisi hidrologi Kabupaten Sumenep dipengaruhi oleh berbagai keberadaan sungai yang berjumlah 11 (sebelas) sungai besar. Sumber air baku berupa sungai di Kabupaten Sumenep dimana wilayah daratan saat ini memiliki debit yang relatif sedang. Maka ketika dilihat dari kondisi debit sungai tersebut, Kabupaten Sumenep yang memiliki wilayah daratan dan juga memiliki wilayah kepulauan yang jauh dan banyak merupakan wilayah yang memiliki potensi hidrologi yang cukup dalam kegiatan drainase perkotaan dan perdesaan. Air yang mengalir dari sungai tersebut bermanfaat untuk kegiatan pertanian yaitu pengairan sawah (Irigasi).

5. Klimatologi

Keadaan cuaca dapat dilihat dari tiga hal, yaitu curah hujan, temperatur, kelembaban dan tekanan udara. Curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Januari, yaitu 98,5. Gejala alam akhir-akhir ini agak sulit diprediksi sehingga curahan hujan paling tinggi tidak berurutan berdasarkan bulan. Data tahun 2010 menunjukkan selain curah hujan paling tinggi di bulan Januari, juga terjadi pada bulan Mei, yaitu 67,5. Pada bulan Juli curah hujan menurun menjadi 0,1. Sementara pada bulan berikutnya cenderung mengalami penurunan sampai bulan Oktober. Bulan ini adalah merupakan puncak dari musim kemarau yang terjadi di Sumenep.

Memperhatikan data yang tersedia pada tahun 2012 memperlihatkan bahwa temperatur paling tinggi mencapai 29,6 °C, yang terjadi pada bulan Oktober. Sedangkan temperatur paling rendah mencapai 24,5 °C yang terjadi pada bulan Pebruari. Sementara itu penyinaran matahari maksimum atau tertinggi mencapai 100%, yang terjadi pada bulan Agustus dan pada bulan Oktober mencapai 99 %. Penyinaran matahari terendah sebesar 56%, yang terjadi pada bulan Pebruari.

Data geografi lain adalah kecepatan angin. Di Kabupaten Sumenep ada tiga bulan di mana kecepatan angin terkategori paling tinggi, yaitu pada bulan Juni, Juli, Agustus dan September. Pada bulan Juli kecepatan angin memperlihatkan angka tertinggi yakni 8,4 knot sedangkan bulan September kecepatan angin mencapai 7,1 knot. Sementara pada bulan Maret, Nopember dan Desember adalah waktu kecepatan angin paling rendah dibanding pada bulan-bulan lainnya.

6. Demografi

Kondisi demografi atau kependudukan di Kabupaten Sumenep dapat digambarkan melalui jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2012 jumlah penduduk di Kabupaten Sumenep adalah 1.053.640 jiwa dengan persebaran jumlah penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Kota Sumenep dengan jumlah penduduk mencapai 71.514 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Batuan dengan jumlah penduduk 12.228 jiwa. Berikut akan disajikan grafik pertumbuhan penduduk dan tabel jumlah serta pertumbuhan penduduk di wilayah Kabupaten Sumenep.

B. Keuangan dan Perekonomian Daerah

Sumber data statistik keuangan pemerintah daerah adalah bagian keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Data yang disajikan meliputi realisasi pendapatan dan belanja keuangan daerah. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Sedangkan belanja atau pengeluaran keuangan daerah terdiri dari belanja aparatur dan belanja publik. PAD adalah pendapatan yang dapat dibangkitkan daerah sebagai pendapatannya, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan perusahaan dan kekayaan daerah yang sah, dan lain-lain PAD. Dana Perimbangan adalah yang berasal dari pemerintah pusat terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagi hasil pajak/bantuan propinsi. Pendapatan lain-lain yang sah adalah bantuan dana penyeimbang dari pemerintah propinsi. Belanja aparatur terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.

Sedangkan belanja publik terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak tersangka.

C. Penataan Umum

Tujuan umum penataan ruang untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai pusat kawasan minapolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata dan industri, sehingga mampu mendorong kemandirian dan daya saing daerah tanpa melupakan perlindungan dan kelestarian sumber daya alam, dengan :

1. Terwujudnya keseimbangan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah perkotaan dan perdesaan baik di wilayah daratan dan kepulauan guna menciptakan kesejahteraan di bidang ekonomi, sosial dan budaya melalui pembangunan fisik dan nonfisik;
2. Terwujudnya suatu kawasan yang menjadi salah satu gerbang masuk Jawa Timur melalui pengembangan konsep sistem pintu jamak (multi gate system) untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan kawasan, khususnya yang berbasis kebaharian.
3. Terwujudnya suatu kawasan yang berjatidiri dan beridentitas yang berlandaskan pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal guna mencapai kemajuan yang mandiri.

Pandangan peneliti potensi sumber daya alam Sumenep yang begitu melimpah ruah baik dari sektor laut, minyak dan gas bumi (migas) atau sumber daya alam lain yang begitu melimpah dan semua ini banyak dimiliki oleh Sumenep

dan tidak banyak dimiliki oleh kabupaten lain di Madura, sebagai generasi yang tentunya semua ini butuh pada pengimbangan penanaman karakter yang baik, pantang menyerah seperti adagium nenek moyang kita Abantal ombe' asapo' angen, (berbantal ombak dan beselimut angin) ini komitmen dan kesungguhan nenek moyang Madura dalam berusaha dan bertindak jangan sampai pada akhirnya kita hanya jadi penonton dan bahkan menjadi babu di daerah sendiri sehingga yang terjadi semua jenis kekayaan yang dimiliki di eksploitasi dan ironinya yang mengelola adalah pihak asing.

Melihat banyak potensi Sumenep, sebagai bentuk upaya Pemkab perlu ada keseriusan dalam pengelolaan demi kelestarian khazanah ini. Pertama memperkuat sistem ekonomi kerakyatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Kedua adalah mempercepat pembangunan wilayah kepulauan secara menyeluruh, proporsional, mempercepat pembangunan khususnya di wilayah yang tertinggal baik yang di kepulauan maupun daratan secara proporsional, yang mana kegiatan ini mencakup semua aspek, baik sarana dan prasarana, perhubungan, sarana informasi, kelistrikan dan sebagainya. Ketiga adalah menyempurnakan sistem pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang ber-orientasi pada keahlian, keterampilan dengan dilandasi oleh nilai-nilai agama dan budaya. Keempat mewujudkan ketersediaan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dan yang terakhir. Kelima adalah meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum. Dikaitkan dengan Visi Kabupaten Sumenep dalam RPJMD Sumenep Tahun 2011-2025 Pembangunan

Kabupaten Sumenep adalah “SUPER MANTAP”: “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”.

D. Sosial Budaya dan Pendidikan

Kondisi sosial dan budaya penduduk di Kabupaten Sumenep akan digambarkan melalui data dan informasi terkait fasilitas pendidikan yang tersedia, jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin serta jumlah rumah penduduk di wilayah Kabupaten Sumenep.

1. Kondisi Fasilitas Pendidikan

Kabupaten Sumenep memiliki fasilitas pendidikan yang tersedia sudah cukup memadai, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi. Jumlah sekolah di Kabupaten Sumenep 1.474 unit, terdiri dari sekolah TK negeri, TK Swasta, SD Negeri, SD Swasta, SMP Negeri, SMP Swasta, SMA Negeri, SMA Swasta, SMK Negeri, dan SMK Swasta. Berikut akan disajikan data fasilitas pendidikan di Kabupaten Sumene

E. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumenep mencapai 190.037 KK. Jumlah tersebut tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Sumenep. Jumlah penduduk miskin tertinggi di Kecamatan Batng-batang dengan jumlah 12.798 KK, sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Batuan dengan jumlah 1.547 KK. Berikut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumenep.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Miskin per Kecamatan di Kabupaten Sumenep

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk Miskin (KK)
1	Pragaan	9.415
2	Bluto	10.112
3	Saronggi	4.197
4	Giligenting	2.771
5	Talango	10.495
6	Kalianget	6.960
7	Kota Sumenep	5.238
8	Batuan	1.547
9	Lenteng	9.619
10	Ganding	5.121
11	Guluk-Guluk	8.928
12	Pasongsongan	6.210
13	Ambunten	10.709
14	Rubaru	5.161
15	Dasuk	4.567
16	Manding	6.276
17	Batu putih	12.260
18	Gapura	5.640
19	Batang-Batang	12.798
20	Dungkek	7.171
21	Nonggunong	3.928
22	Gayam	9.170
23	Raas	6.251
24	Sapeken	6.384
25	Arjasa	9.662
26	Kangayan	5.452
27	Masalembu	3.995
Jumlah		190.037

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

F. Profil Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumenep

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 Lembaran Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang

Kedudukan dan Susunan OPD Kabupaten Sumenep disebutkan bahwa Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kelautan dan perikanan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sumenep melalui Sekretaris Daerah.

2. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan LKjIP adalah:

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep tahun 2016 – 2021.

8. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sumenep.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumenep Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2016.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
11. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Sumenep Tahun 2017.
13. Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017.

3. Pokok dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep No. 28 Tahun 2008 dengan tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Otonomi Daerah bidang Perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan fungsi adalah :

1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas Perikanan
2. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan bidang Perikanan
3. Pelaksanaan pembinaan teknis dan pengembangan usaha bidang Perikanan

4. Pelaksanaan pemberian bimbingan, pengawasan dan perlindungan bidang Perikanan
5. Pelaksanaan pembinaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta pendayagunaan sumberdaya Perikanan
6. Pelaksanaan pengkajian dan aplikasi penerapan teknologi tepat guna, eksplorasi dan teknologi perikanan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep sebagaimana terlampir.

G. Visi Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep

1. Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan yang merefleksikan cita-cita yang ingin dicapai dan sekaligus menentukan arah perjalanan institusi ini. Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep merupakan salah satu institusi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, maka secara logis visinya merupakan visi Pemerintah Kabupaten Sumenep, yaitu :

"Sumenep makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional".

2. Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep

Untuk mewujudkan Visi Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan maka perlu merumuskan Misi yang menggambarkan upaya untuk mencapai penggalan cakupan dari visi yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan.
2. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan.
3. Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi.
4. Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Accountable.
5. Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan.
6. Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

H. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Misi Kabupaten Sumenep yang telah dirumuskan pada Misi III “Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memberdayakan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi” perlu diterjemahkan dalam bentuk Tujuan yang akan dicapai Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep yaitu “Meningkatkan manfaat ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan“

Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan secara terukur dan nyata dalam jangka waktu tahunan atau bulanan. Fokus utama Sasaran adalah tindakan, alokasi, distribusi dan pemanfaatan sumberdaya yang mengarah pada hasil nyata. Maka Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep merumuskan pada Sasaran yang menggambarkan upaya untuk mencapai Tujuan yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya.
2. Meningkatnya Kecukupan Konsumsi Ikan Masyarakat.
3. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kelompok Perikanan.
4. Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Usaha Kegiatan Bidang Kelautan dan Perikanan.
5. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir



I. Struktur Organisasi

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep

